

Ikhtisar Webinar

Konflik Negara Adidaya dan Disrupsi Ekonomi Global: Strategi Indonesia?



Konflik Negara Adidaya dan Disrupsi Ekonomi Global: Strategi Indonesia?

28 September 2022 | 14.00-16.00 WIB

Webinar Konflik Negara Adidaya dan Disrupsi Ekonomi Global: Strategi Indonesia dibuka oleh kata sambutan Andi Widjajanto sebagai Penasihat Senior Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) sekaligus Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lima narasumber yang hadir dalam *webinar* ini adalah (1) I Gede Ngurah Swajaya, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; (2) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; (3) Reine Prihandoko, Analis Kebijakan Politik Keamanan, Laboratorium Indonesia 2045; (4) Ian Motratama, dosen hubungan internasional, Universitas Pertamina; dan (5) Adi Priamarizki, peneliti, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), serta dimoderatori oleh Jessica Martha, dosen hubungan internasional, Universitas Parahyangan. *Webinar* ini juga sekaligus menjadi wadah untuk memaparkan hasil penelitian kolaborasi antara Laboratorium Indonesia 2045 dengan Parahyangan Center for International Studies, Universitas Katolik Parahyangan (PACIS UNPAR).

Andi Widjajanto membuka dengan menyatakan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memaparkan penelitian terkait konflik antarnegara adidaya, mengingat telah terjadi banyak peristiwa di dunia yang mengarah kepada perang, seperti serangan militer di Ukraina dan ketegangan Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, terutama di Selat Taiwan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memitigasi risiko dari krisis-krisis yang menjadi dampak pertarungan geopolitik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan strategi jangka pendek maupun panjang untuk menghadapi kompetisi hegemoni antarnegara adidaya.

I Gede Ngurah Swajaya mengungkapkan bahwa situasi dunia yang kompleks memicu terjadinya eskalasi yang melibatkan banyak negara. Namun, tidak hanya dihadapkan pada konflik Rusia-Ukraina, dunia harus sadar dengan permasalahan krusial lainnya seperti perubahan iklim, krisis energi dan pangan, serta kondisi dunia yang belum pulih dari pandemi COVID-19. Di samping itu, dunia harus siap dengan

penurunan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2023. Ini didasarkan pada perhitungan bahwa terjadi inflasi di atas 6% pada pusat ekonomi dunia. Beliau juga menyampaikan bahwa peluang untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina sulit terwujud, mengingat kedua pihak yang tidak dapat memenuhi persyaratan masing-masing. Untuk menghadapi semua krisis yang akan terjadi, Indonesia berusaha memainkan peran penting melalui komunikasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun dialog secara bilateral. Indonesia melalui forum G20 dapat menggunakan kesempatan presidensi untuk menyelesaikan isu-isu ekonomi dan menawarkan tiga solusi utama, yakni: sektor kesehatan, energi, dan transformasi digital. Terakhir, Indonesia harus menerapkan politik luar negeri bebas-aktif, melakukan diversifikasi ekonomi, dan mempertahankan demokrasi sebagai visi untuk Indonesia Emas 2045.

Amalia Adininggar Widyasanti menunjukkan adanya potensi resesi global dan negara maju yang semakin tinggi. Hal ini berdampak pada negara berkembang karena bank sentral global cenderung merespons situasi ini dengan pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Sikap ini mengakibatkan keluarnya modal asing dari negara-negara berkembang (*sudden stop* dan *flight to quality*) yang merugikan. Namun, ekonomi Indonesia masih tumbuh kuat di tengah ketidakpastian global. Ini dibuktikan dari angka pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5%, angka ini hampir sama seperti pada saat sebelum pandemi. Sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan Indonesia, mengingat ketahanan yang besar dalam menghadapi krisis dan fakta bahwa sektor pertanian menyumbang lebih dari 20% lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah merealisasikan program ini melalui pelaksanaan *food estate* dan peningkatan sistem logistik. Terakhir, pemerintah mencoba untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah inflasi.

Reine Prihandoko memaparkan hasil penelitian kolaborasi antara LAB 45 dan PACIS UNPAR. Indonesia merupakan negara *lesser power*, yakni negara yang tidak besar akan tetapi masih memiliki peran yang cukup besar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi raya Indonesia dalam menghadapi perang hegemonik antara negara-negara adidaya. Penelitian ini menganalisis dua determinan pada enam

simulasi skenario sederhana, yakni intensitas perang antar negara adidaya dan risiko konflik terhadap Indonesia. Pada determinan pertama, intensitas diukur berdasarkan komitmen negara hegemon dan perimbangan kekuatan terkait distribusi dan kemutakhiran teknologi persenjataan negara-negara rawan konflik di seluruh skenario. Determinan kedua menghitung risiko konflik dari dampak disruptif terhadap perdagangan bilateral dan jarak geografis wilayah konflik dengan perbatasan Indonesia. Dari hasil analisis, penelitian ini menawarkan empat opsi strategi raya bagi Indonesia, yakni reposisi, deeskalasi, sekuritisasi, dan mobilisasi yang bisa dipilih salah satunya atau digunakan secara kombinasi.

Ian Montratama berpendapat bahwa perang sering dipicu rasa takut. Pola yang sama antara perang Athena-Sparta juga terjadi pada saat ini. AS merasa terancam atas kebangkitan Tiongkok sehingga berusaha untuk mempertahankan *status quo*-nya. Dalam hal ini, terdapat dua opsi yakni Perang atau Perang Dingin. Indonesia berada di tengah persaingan *great powers*. Hal ini dipicu kebangkitan Tiongkok yang terlalu cepat dan besar. Berdasarkan prinsip dan tujuan politik luar negeri Indonesia, Indonesia harus mampu merangkul AS maupun Tiongkok secara bersamaan. Ini dapat diwujudkan melalui peningkatan ekonomi dengan Tiongkok, sedangkan pertahanan dan regionalisme ditingkatkan dengan AS.

Adhi Priamarizki menjelaskan perubahan haluan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Indonesia sebagai poros maritim menjadi diplomasi membumi. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Jokowi mencoba meningkatkan partisipasi Indonesia di forum internasional, seperti Sidang Majelis Umum PBB 2020 dan *shuttle diplomacy* Rusia-Ukraina 2022. Selanjutnya, Asia Tenggara yang menjadi fokus utama dari kebijakan luar negeri Indonesia sedang berada pada posisi yang tidak aman karena situasi geopolitik yang semakin tidak kondusif. Maka dari itu, Indonesia harus mampu mencari mitra baru jika situasi semakin memburuk. Kebijakan luar negeri Jokowi dengan negara adidaya berfokus pada orientasi domestik, terutama ekonomi (*Indonesia First Policy*). Terakhir, tantangan potensial yang dihadapi Indonesia adalah kompetisi negara adidaya selain AS-Tiongkok, kerja sama di luar Asia Tenggara, dan kebijakan luar negeri domestik sentris dan politik luar negeri bebas aktif.

Terdapat sejumlah pertanyaan yang dilemparkan dalam sesi tanya-jawab. Salah satu pertanyaan adalah terkait pengaturan kerangka kerja sama regional, seperti AUKUS, Quad, dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang dibangun dengan skema destabilisasi geopolitik juga dimaksudkan untuk membendung dan menahan kekuatan Tiongkok di kawasan. IPEF yang melibatkan 13 negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) termasuk Indonesia memiliki empat bidang kerja sama regional, termasuk penataan kembali rantai produksi, energi terbarukan, perdagangan, dan pemberantasan korupsi. Namun, ada pendapat yang menganggap bahwa peran utamanya adalah untuk menahan Tiongkok melalui pembatasan pertukaran barang, ide, dan jasa, terutama pertukaran teknologi sehingga ditengarai sebagai bentuk *proxy war* melawan Tiongkok.

I Gede Ngurah Swajaya menjawab dengan mengingatkan bahwa AS akan tetap pada prinsip untuk terus mengimbangi kekuatan Tiongkok sebagai wujud dari *containment*. IPEF bisa menjadi peluang bagi Indonesia karena sesuai dengan kepentingan nasional, akan tetapi berbeda dengan AUKUS karena sejak awal bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia. Sementara itu, Ian Montratama berpendapat bahwa AUKUS memang sejak awal ditujukan untuk melakukan *containment* agar dapat menahan laju Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Inisiatif AS tetap akan bersifat *hostile* terhadap Tiongkok dan Indonesia harus bersikap dengan tidak memihak kedua negara. Namun, yang lebih penting bagi Indonesia adalah untuk memanfaatkan situasi yang ada melalui kedekatan ekonomi dengan Tiongkok dan keamanan bersama AS yang diwujudkan dalam bentuk *quasi*-aliansi.

Selain itu, terdapat pertanyaan apakah koalisi negara-negara *middle power* atau yang memiliki kepentingan serupa (*like-minded states*) sebenarnya sanggup untuk menyetir agenda global. Adhi Priamarizki menjawab bahwa hal itu mungkin, namun komitmen negara-negara tersebut harus dilihat terlebih dahulu. Penting untuk dipahami bahwa banyak agenda global yang memang tidak populer di dalam negeri.



Jl. Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.



Rabu, 28 September
2022

➔ +62811452045

➔ lab45@lab45.id

➔ www.lab45.id